
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) DI KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Oleh
Muhammad Helmi Zein
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta
Email: mhelmizein@ipdn.ac.id

Abstract

Jakarta has a relatively low number of settlements and the level of comfort index for residents of Jakarta is still at an average level. This is due to the lack of good public infrastructure. The Provincial Government of DKI Jakarta has made a program for Handling Infrastructure and Public Facilities (PPSU) in order to accelerate the functioning of locations / infrastructures and assets of public facilities as well as damaged, dirty or unsuitable utilization. The Program launched in order to optimize services to the community. The purpose of this research is to explain how the implementation of Public Infrastructure and Management Handling Program (PPSU) in Melawai sub-district, explains the factors that influence the implementation and analyze strategies in improving the program. This study uses descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection comes from observations, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study use data reduction, data presentation and conclusion drawing and finding strategies by SWOT analysis. Based on the result, founded by the author, the implementation of PPSU in Melawai sub-district has not been running optimally. As has not yet been seen to be maximum are the support of community participation to engage in environmental cleaning up activities, the frequent accumulation of rubbish heaps, dirty sewers and illegal graffiti have not been handled. The success of the program have not been achieved because of influenced by the low performance of PPSU officers in terms of work motivation and less discipline. The author recommends a strategy by periodically evaluating the performance of PPSU officers and improving the operational (monitoring, coaching and supervising) operations of PPSU officers intensively and sustainably.

Keywords: Implementation, Public Infrastructure and Handling Program (PPSU)

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi hingga ditetapkan otonomi daerah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan membuat berbagai inovasi kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Most Livable City Index (MLCI) merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap, dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari beberapa aspek perkotaan. Tingkat kenyamanan hidup warga Jakarta masih rendah, sehingga dalam mewujudkan lingkungan yang baik, maka dibutuhkan sarana dan prasarana umum yang baik untuk menjadi penunjang bagi kehidupan

masyarakat. Jakarta merupakan kota yang strategis sebagai pusat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana umum yang baik menjadi sangat penting. Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator untuk mengukur kenyamanan dan kelayakan suatu lingkungan. Oleh karena itu, mewujudkan kota yang layak huni dan manusiawi maka akan bertitik tolak pada pengelolaan sarana dan prasarana umum.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kenyamanan hidup warga Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat suatu program yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dan telah disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan. Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

Tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program ini dalam rangka melakukan upaya perumusan kebijakan guna mempercepat berfungsinya prasarana dan sarana umum. Kebijakan tersebut dilaksanakan pada tingkat kelurahan, karena kelurahan merupakan pelayanan tingkat dasar yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan ini diharapkan permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat terkait prasarana dan sarana umum segera ditangani serta dalam rangka

mewujudkan suatu kota layak huni bagi masyarakatnya.

Melihat dari sasaran tersebut tampak jelas bahwa dukungan terhadap pelaksanaan Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) harus optimal, mengingat kondisi tersebut merupakan suatu langkah nyata dalam menyelesaikan masalah-masalah perkotaan secara lebih komprehensif dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat dan mewujudkan suatu kota yang layak huni bagi masyarakat.

Berdasarkan data Jakarta Dalam Angka Tahun 2019 yang bersumber dari BPS bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah 662,33 km² yang terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Wilayah tersebut terbagi atas 44 kecamatan yang terdiri dari 267 kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak salah satunya adalah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan jumlah total 65 kelurahan. Kemudian di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, wilayah yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Kebayoran Baru yang merupakan pusat pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan jumlah 10 kelurahan. Dengan banyaknya jumlah kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan maka pelaksanaan program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) harus tetap berjalan dengan baik dan terkendali di wilayah tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk membahas lebih dalam terkait pelaksanaan program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya di Kecamatan Kebayoran Baru.

Berdasarkan pantauan data dari aplikasi Qlue dan JAKI yang diakses pada 10 Januari 2020 bersumber dari aduan masyarakat bahwa masalah perkotaan terkait sarana dan prasarana umum masih sering terjadi di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru antara lain; kondisi jalan dan fasilitasnya yang kurang baik

yang dapat membahayakan pengguna jalan; masih terdapat tumpukan sampah yang berserakan, masih ditemukan trotoar yang rusak; banyak kabel utilitas yang mengganggu/membahayakan aktivitas publik; masih terdapat beberapa saluran air yang tidak ada penutupnya; dan kondisi saluran air yang masih banyak timbunan lumpur/tanah dan sampah yang dapat memicu terjadinya banjir. Kemudian berdasarkan aplikasi Qlue tersebut bahwa kelurahan yang nilainya masih tergolong rendah di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru adalah Kelurahan Melawai dengan nilai 63 poin, yang mengakibatkan posisi peringkat kelurahan ini dalam aplikasi Qlue berada pada peringkat 227 dari total 267 kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di lingkungan sekitar Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru bahwa kondisi sarana dan prasarana lingkungan terkait kebersihan masih perlu ditingkatkan. Terbukti bahwa masih banyak timbunan dan ceceran sampah yang berserakan, masih banyak ditemukan coretan-coretan liar yang berada pada fasilitas publik, dan juga beberapa ranting-ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas dan menutupi kabel utilitas yang dapat membahayakan keselamatan publik. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis dalam membahas mengenai pelaksanaan penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai lebih mendalam.

Kelurahan Melawai merupakan salah satu lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta Selatan tepatnya di kawasan Blok M. Kawasan ini merupakan wilayah yang termasuk cukup ramai lalu lalang warga masyarakat, karena di kawasan ini terdapat terminal angkutan darat dalam kota Jakarta yang ramai yaitu Terminal Blok M, stasiun MRT Blok M, serta terdapat pusat perbelanjaan yang cukup besar seperti Pasaraya, Blok M Square dan Plaza Blok M. Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia tentunya membutuhkan dukungan prasarana dan sarana umum yang baik pula. Dukungan prasarana dan sarana umum yang baik di kawasan perekonomian dan bisnis akan

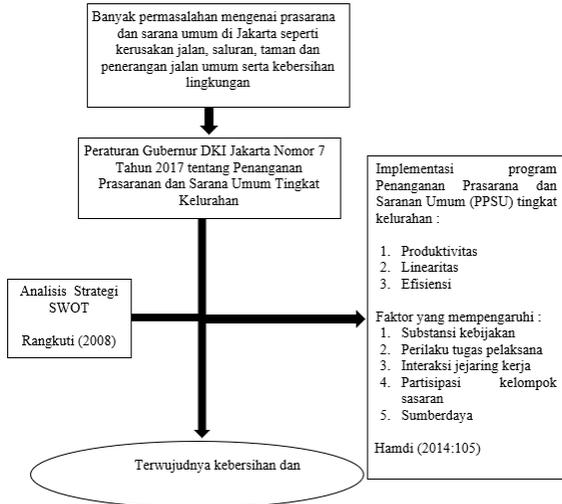
berdampak pada aspek sosial dan ekonomi pada masyarakat, seperti roda perekonomian akan terus bergerak, investasi semakin meningkat hingga hubungan sosial yang baik antar masyarakat semakin meningkat serta dapat terwujud lingkungan yang baik dan sehat yang memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (Ppsu) Di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

Masalah penelitian yang ada dalam pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru?
2. Apa dukungan dan hambatan implementasi program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru?
3. Apa strategi untuk meningkatkan implementasi program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru?

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan program penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan berdasarkan teori Hamdi (2014). Penulis membuat kerangka dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019

LANDSAN TEORI Kebijakan Publik

Wahab (2012), menyatakan bahwa “a *purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”, yang berarti kebijakan adalah serangkaian langkah atau tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Winarno (2007), dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternative yang ada. Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola

kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu (Winarno, 2007).

Syafrri dan Setyoko (2008), yang mengatakan bahwa untuk disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu diikuti langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Winarno (2007), mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta”. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya” (Agustino, 2016).

Implementasi Kebijakan Publik

Agustino (2016), menyatakan bahwa “Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action program* dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”. Implementasi merupakan sebuah rantai penghubung formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Menurut Agustino (2015), “keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2016), implementasi disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli ini berpendapat bahwa “kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-

tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi”.

Program

Suharto (2008), program adalah seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. Sedangkan Nugroho (2013), mendefinisikan bahwa “*A projected program of goals, values, and practices,*” (suatu program diproyeksikan dengan tujuan, nilai dan praktik tertentu). Pembangunan program yang Hamdi (2014), bahwa pembangunan program dapat sama seperti kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan publik, namun dengan tekanan yang lebih spesifik pada kegiatan desain.

Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Selain itu prasarana atau yang sering disebut disebut infrastruktur adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam penunjang penyelenggaraan suatu kegiatan oleh organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana di suatu daerah merupakan faktor penting sebagai penunjang pengembangan suatu daerah (Jayadinata, 1992).

Analisis Strategi

Analisis strategi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari kata *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (ancaman). Analisis SWOT adalah identifikasi untuk melihat strategi berdasarkan hubungan unsur pendukung. Menurut Rangkuti (2008), analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal yaitu kelemahan dan kekuatan terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

Pelayanan Publik Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Pelayanan umum atau pelayanan publik Hardiyansyah (2011), pelayanan umum atau pelayanan public adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Design Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang dirancang untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin di lapangan mengenai kondisi yang apa adanya, kemudian di gambarkan atau di deskripsikan secara sistematis dan dihubungkan dengan teori atau pola-pola yang sesuai dengan topik penelitian hingga dapat ditarik kesimpulan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian merupakan batasan pengertian yang akan dibahas pada penelitian dan memberikan gambaran tentang konteks yang berkaitan dengan fokus penelitian/ ruang lingkup penelitian memuat aspek-aspek yang akan diteliti dari suatu objek yang dapat digunakan untuk menjawab suatu masalah penelitian. Ruang lingkup penelitian tersebut diuraikan dalam focus penelitian, dimensi dan indicator dari masalah yang akan diteliti.

Sumber Data

Sumber data primer pada penelitian ini melalui proses wawancara, diperoleh langsung dari sumber tanpa melalui perantara, pada penelitian ini penulis akan mengambil sumber data melalui informan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Kelurahan Melawai

Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Informan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan. *Snowball sampling* menurut Given (2008:816) yaitu :

Snowball sampling is a useful way to pursue goals of purposive sampling in many situations where there are no lists or other obvious sources for locating members to population of interests, but it does require that the participants are likely to know others who share the characteristics that make them eligible for inclusion in the study.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa teknik pengambilan sampel sumber data pada awalnya jumlahnya sedikit namun lama kelamaan menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang dapat menjadi sumber data (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan). Dalam penggunaan teknik *snowball* memungkinkan penulis menambah informan yang dapat dijadikan sumber data.

Sesuai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa informan adalah pihak yang paling mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti sehingga penulis akan mendapat informasi yang akurat.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan guna mengamati sejauh mana implementasi program Penanganan Prasarana dan Saranan Umum (PPSU) yang berada di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mencari informasi yang mendalam melalui pengalaman seseorang sesuai dengan topik penelitian sebagai tindak lanjut informan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Pedoman wawancara ini merupakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga akan mendapatkan keterangan yang akan diolah untuk menjawab permasalahan tersebut.

Teknik Analisis Data

Selama proses ini peneliti membuat berbagai evaluasi dan informasi yang didapat. Namun, peneliti tidak membuat kesimpulan diawal selama proses penelitian. Tetapi data yang ada dikumpulkan, dianalisis dan didefinisikan sehingga dapat menarik kesimpulan yang sesuai. Selanjutnya menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan isu-isu strategis (Rangkuti 2008). Analisis ini didasari atas logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis situasi internal (faktor-faktor kekuatan dan kelemahan) dikombinasikan dengan faktor eksternal (faktor peluang dan ancaman) akan menghasilkan beberapa strategi alternatif pengembangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Kelurahan Melawai

Lokasi Kelurahan Melawai merupakan lokasi terbesar wilayah yang memiliki fasilitas umum terbesar di Kecamatan Kebayoran Baru. Di wilayah Kelurahan Melawai ini merupakan tempat pusat sentra bisnis dan kawasan perniagaan serta di wilayah ini terdapat Stasiun MRT Blok M, Terminal Blok M, taman-taman kota, Gelanggang Olahraga, Sekolah dan Pasar Tradisional sehingga pelaksanaan penanganan prasarana

dan sarana umum harus dilakukan secara baik dan komprehensif dalam rangka menunjang kegiatan aktivitas publik.

Kondisi Demografi Kelurahan Melawai

Penduduk di wilayah Kelurahan Melawai sampai dengan bulan Desember 2019 terdiri dari 1.082 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 3.203 jiwa. Komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.532 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.671 jiwa. wilayah Kelurahan Melawai jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif, yaitu dengan rincian jumlah usia belum produktif (0-14 Tahun) sebanyak 708 jiwa, jumlah usia produktif (15-64 Tahun) 2.057 jiwa dan jumlah usia non produktif (diatas 65 Tahun) sebanyak 323 jiwa. Banyaknya jumlah usia produktif di Kelurahan Melawai menggambarkan bahwa masyarakat Kelurahan Melawai masih memiliki sumberdaya manusia yang aktif untuk memenuhi kebutuhan, ditambah wilayah Melawai merupakan tempat ramai kunjungan masyarakat Jakarta dan sekitarnya sehingga diperlukan sarana dan prasaranan yang memadai dalam menunjang kegiatan sehari-harinya.

Kondisi Pendidikan Kelurahan Melawai

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membina serta memajukan suatu wilayah yang berdampak pada majunya Bangsa Indonesia agar dapat bersaing pada era globalisasi saat ini. Pendidikan juga merupakan salah satu factor dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan dari segi pendidikan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kelurahan Melawai cukup memadai dan sudah memiliki standar fasilitas yang baik yang sudah ditetapkan guna meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar khususnya di wilayah Kelurahan Melawai.

Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Kelurahan Melawai

Pada dasarnya pemerintah yang merupakan pelayan masyarakat salah satu tugasnya adalah dengan memenuhi sarana dan

prasarana umum bagi masyarakat. Namun sekarang ini juga dituntut peran kolaboratif dari masyarakat bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga merawat dan menjaga sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut. Dalam rangka menjaga dan merawat sarana dan prasarana atau aset publik agar berjalan sesuai peruntukannya maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat suatu program layanan yang disebut dengan Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan di DKI Jakarta

Kelembagaan Kantor Kelurahan Melawai

Kebijakan program PPSU Tingkat Kelurahan Melawai berada di bawah tanggungjawab Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan pembangunan serta kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Implementasi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Program PPSU ini dijalankan pada setiap kelurahan di DKI Jakarta dengan merekrut petugas melalui perjanjian kontrak. Pelaksanaan PPSU tingkat kelurahan dilakukan setiap hari sesuai dengan pengaturan jadwal kerja dan pembagian waktu kerja yang ditetapkan dalam SPK (Surat Perintah Kerja) Petugas PPSU. Masing-masing kelurahan memiliki jumlah petugas PPSU yang berbeda-beda. Hal ini didasari dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan. Setelah melewati seleksi maka ditetapkan petugas PPSU tingkat kelurahan di Kelurahan Melawai melalui Berita Acara Hasil Penerimaan beserta nama-nama peserta yang

lulus, serta selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Petugas PPSU terpilih.

Penanganan prasarana dan sarana umum yang tidak bisa diselesaikan oleh petugas PPSU maupun kegiatan diluar kewenangan petugas PPSU maka disampaikan dan dikoordinasikan dengan Dinas/OPD pada Satuan Pelaksana Kecamatan terkait sesuai bidang permasalahan. Satuan Pelaksana yang paling sering bekerjasama dengan PPSU tingkat kelurahan adalah Satuan Pelaksana dari Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru. Apabila pekerjaan yang ditangani oleh petugas PPSU kelurahan membutuhkan bantuan dari Satpel dinas-dinas terkait maka petugas PPSU segera melapor kepada koordinator lapangan, dan diteruskan kepada lurah untuk menghubungi Satpel dinas terkait. Koordinasi lurah dengan dinas bisa melalui whatsapp, surat ataupun sistem yang sudah reintegrasi antara Lurah dengan OPD dan Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu aplikasi CRM (*Citizen Relation Management*) yang sebelumnya menggunakan aplikasi CROP (Cepat Respon Opini Publik). Apabila laporan telah diterima oleh Satpel Dinas terkait, maka dinas tersebut akan mendatangi lokasi permasalahan yang dilaporkan dan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut oleh dinas terkait serta dimungkinkan dengan bantuan petugas PPSU.

Laporan tertulis akan dibuat oleh petugas PPSU dengan berita acara yang ditandatangani oleh koordinator lapangan dan ketua kelompok beserta saksi yaitu perwakilan masyarakat setempat. Ini juga salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat dalam pengawasan petugas PPSU di lapangan. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan PPSU tingkat kelurahan dibuat laporan perhari oleh koordinator lapangan seperti tercantum pada lampiran VII. Selanjutnya Lurah Melawai

menyusun rekapitulasi dan melaporkan kegiatan PPSU kepada Camat Kebayoran Baru setiap satu bulan sekali. Selanjutnya Camat Kebayoran Baru akan meneruskan laporan kepada Walikota Jakarta Selatan untuk diteruskan kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dimensi Produktivitas

Hasil dari wawancara menyatakan bahwa implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dilakukan sesuai dengan program kerja dan target yang ada di Kelurahan Melawai, para petugas PPSU juga sudah bekerja secara maksimal dengan tugas yang telah diberikan. Kendati demikian, memang sebagian besar lingkungan di melawai merupakan wilayah yang ramai aktivitas warga, sehingga permasalahan penangan prasarana dan sarana umum khususnya tentang kebersihan lingkungan harus selalu menjadi perhatian untuk ditingkatkan dalam rangka memberikan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat. Di sisi lain suksesnya pelaksanaan program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) ini juga membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Hal ini juga menjadi target dalam pelaksanaan program PPSU di Kelurahan Melawai yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan. Masyarakat secara aktif melaporkan permasalahan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai. Biasanya untuk warga Kelurahan Melawai sendiri langsung datang melapor ke kantor kelurahan atau menghubungi aparat kelurahan, sedangkan masyarakat secara umum yang kebetulan melintas di wilayah melawai melaporkan permasalahan melalui kanal pengaduan di aplikasi *Qlue*. Masyarakat juga aktif mengawasi kegiatan PPSU, seperti penuturan Ketua RW 01 Kelurahan Melawai, “masyarakat selalu mengawasi pekerjaan PPSU, dan jika ada permasalahan kebersihan lapor kepada petugas PPSU.

Dimensi Linearitas

Implementasi kebijakan penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan

Melawai dilihat dari Dimensi Linearitas, indikator prosedurnya sudah berjalan, dimulai dari pengadaan pekerja petugas penanganan prasarana dan sarana umum hingga pelaksanaan program sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku walaupun pada aspek pelaporan ditemukan bahwa pelaporan pekerjaan PPSU belum sesuai dengan aturan yang ada sehingga membuat prosedur semakin panjang. Waktu pelaksanaan pekerjaan dan pembagian tugas dalam pekerjaan penanganan prasarana dan sarana umum telah ditetapkan sesuai jam kerja pada tiap regu dan kelompok masing-masing, namun kadang ada beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan waktu lebih sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lama. Dilihat dari aspek biaya dan tempat sudah sesuai yaitu biaya yang tidak semakin besar dan tempat pelaksanaan yang hanya di lingkungan Kelurahan Melawai. Selanjutnya melihat dari pelaksana yaitu mulai lurah, koordinator lapangan dan petugas PPSU sudah sesuai dengan struktur keanggotaan dan pembagian tugas yang diatur dalam ketentuan dan dokumen yang mengaturnya. Namun dalam hal pelaksanaan tugasnya, masih terdapat petugas PPSU yang kurang disiplin dan malas bekerja sehingga kinerjanya rendah. Secara keseluruhan implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Melawai dilihat dari Dimensi Linearitasnya belum linear dalam pemenuhan standar sesuai implementasi kebijakan yang ditentukan karena masih terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pemenuhan tersebut. Hal ini berdampak pada ketercapaian pelaksanaan program bahwa belum seluruhnya lingkungan kota terlihat nyaman dan bersih, serta keberhasilan program penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan penyelesaian persoalan masalah fasilitas publik masih perlu ditingkatkan.

Dimensi Efisiensi

Implementasi kebijakan penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan

Melawai dilihat dari Dimensi Efisiensi, indikatornya adalah tingkat pendayagunaan sumberdaya (pelaksana, aset, dana dan teknologi) sudah berjalan efektif dan efisien, karena dari segi pelaksana ada program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan sehingga dapat bekerjasama secara tim dalam menyelesaikan tugas dan menguasai teknologi dengan baik. Sarana dan prasarana fasilitas fisik pendukung kegiatan telah tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas penanganan PPSU di Kelurahan Melawai. Pemanfaatan jaringan teknologi dalam berkomunikasi telah terbangun sistem dengan baik antar pelaksana masing-masing tugas, sehingga mempermudah koordinasi dan penyelesaian tugas dan pekerjaan di lapangan. Secara keseluruhan implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Melawai dilihat dari Dimensi Efisiensi bahwa penggunaan pelaksana, aset dan dana sudah dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi yang semakin tepat sehingga implementasi kebijakan berjalan efisien. Penggunaan teknologi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pekerjaan penanganan prasarana dan sarana umum dalam aspek menindaklanjuti permasalahan prasarana dan sarana umum serta laporan warga demi terwujudnya kebersihan lingkungan dan kenyamanan hidup warga masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis pada saat penelitian, maka dapat dilihat dari masing-masing indikator bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai.

Substansi Kebijakan

Kebijakan program penanganan prasarana dan sarana umum merupakan wujud implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui peraturan yang pertama kali melalui Peraturan Gubernur Nomor 169 tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana

Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 dan diganti melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 dan disempurnakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

Interaksi Jejaring Kerja

Untuk mendukung terlaksananya tujuan dari penanganan prasarana dan sarana umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk Dinas/UKPD yang terkait dengan tugas penanganan prasarana dan sarana umum. Dilihat dari interaksi jejaring kerja maka dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai.

Partisipasi Kelompok Sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai dari partisipasi kelompok sasaran dapat dilihat dari tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada.

Sumberdaya

Implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Melawai, ketersediaan sumber daya kebijakan akan turut mempengaruhi implementasi program kebijakan. Adapun indikator sumber daya dalam penelitian ini dilihat dari aspek kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi.

Strategi Meningkatkan Implementasi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Hasil analisis SWOT dan Litmust Test, maka diperoleh 4 isu strategis yang selanjutnya dijadikan strategi dalam meningkatkan penanganan prasarana dan sarana umum di

Kelurahan Melawai. Adapun strategi yang dapat disarankan sesuai tingkat isu prioritas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian (monitoring, pembinaan dan pengawasan) operasional petugas PPSU kelurahan secara intensif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PPSU, apakah sudah sesuai dengan kontrak kerja serta beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja melalui pemantauan kehadiran harian dan realisasi pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan. Penilaian evaluasi kinerja petugas PPSU ini dievaluasi secara berkala dan dapat dijadikan pedoman serta rekomendasi dalam perekrutan petugas PPSU pada tahun berikutnya.

2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif antar Dinas/OPD terkait pengaduan masyarakat dan pelayanan publik terhadap pelaksanaan tugas diluar kewenangan PPSU sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini setiap pelaporan dan pengaduan terkait penanganan prasarana dan sarana umum dikoordinasikan secara baik. Apabila permasalahan dan pengaduan masyarakat merupakan tugas pekerjaan diluar kewenangan PPSU, maka koordinasi dapat dilakukan melalui aplikasi CRM (*Citizen Relation Management*) serta melalui surat tertulis antar pihak kelurahan dalam hal ini pengelola PPSU dengan satuan pelaksana tugas yang ada di kecamatan. Setiap pengaduan masyarakat di monitor perkembangannya agar dapat terselesaikan dengan cepat dalam rangka memberikan kenyamanan dan kebersihan lingkungan di masyarakat.

3. Memanfaatkan sistem koordinasi dan komunikasi dalam peningkatan disiplin

petugas PPSU dengan evaluasi kinerja melalui *reward and punishment*.

Dalam hal ini mendorong peningkatan disiplin petugas PPSU melalui koordinasi dan komunikasi dengan selalu melaksanakan kehadiran apel pagi tepat waktu dan memonitoring kehadiran melalui *WhatsApp* grup serta evaluasi kinerja yang secara berkala. Selanjutnya pada evaluasi kinerja dapat diterapkan sistem *reward and punishment* dengan cara memberikan suatu penghargaan bagi petugas PPSU yang teladan dan memberikan hukuman bagi petugas PPSU yang berkinerja rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja petugas PPSU dalam setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat bukan hanya sebagai pengawas kegiatan PPSU, melainkan ikut terlibat langsung dalam kegiatan gotong-royong kerja bakti pembersihan lingkungan.

Dalam hal ini menggalakkan kegiatan kerja bakti bersama setiap minggu yang dilaksanakan di lingkungan sekitar kelurahan. Kegiatan kerja bakti dilakukan secara sinergi oleh petugas PPSU, perangkat kelurahan, Lembaga Kelurahan dan juga masyarakat. Ketua RT dan Ketua RW dapat membantu melakukan sosialisasi dan memobilisasi warga dalam setiap pelaksanaan kegiatan gotong-royong kerja bakti pembersihan lingkungan. Kelurahan selain mendorong aktif masyarakat untuk gotong-royong kerja bakti bersama juga secara berkala memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan mengenai implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Melawai, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di

Kelurahan Melawai belum berjalan maksimal

2. Adapun keberhasilan program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Melawai belum tercapai dikarenakan pekerjaan penanganan prasarana dan sarana umum belum dilakukan sesuai pedoman pelaksanaan dalam ketentuan yang berlaku, serta dipengaruhi oleh kinerja petugas PPSU yang masih rendah dilihat dari segi motivasi bekerja dan disiplin yang masih kurang dalam mewujudkan pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

3. Strategi meningkatkan keberhasilan program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Melawai dalam mewujudkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan dengan cara melakukan evaluasi kinerja petugas PPSU secara berkala dan meningkatkan pengendalian (monitoring, pembinaan dan pengawasan) operasional petugas PPSU kelurahan secara intensif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Melawai untuk lebih peduli kepada kebersihan lingkungan, serta meningkatkan koordinasi dengan satuan pelaksana tugas maupun dengan RT/RW dan Lembaga Kelurahan sebagai perpanjangan tangan aparat kelurahan untuk menggerakkan masyarakat agar melaksanakan kerja bakti rutin secara bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman.

2. Untuk mengatasi beberapa faktor yang mempengaruhi pada implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Melawai perlunya menerapkan evaluasi kinerja melalui *reward*

and *punishment* bagi petugas PPSU serta memahami dan melaksanakan program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara utuh dan konsisten yang termuat pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017 terutama pada lampiran yang menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan program.

3. Dengan mengetahui analisis strategi faktor internal dan eksternal dapat memanfaatkan strategi yang telah disusun dalam rangka meningkatkan implementasi program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, L. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [2] Hamdi, A. S. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- [3] Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- [4] Jayadinata, J.T. 1992. Pembangunan Desa dalam Perencanaan. Bandung: ITB.
- [5] Nugroho. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Dengan Sistem Pre-Order Secara Online (Studi Kasus pada Online Shop Choper Jersey). Skripsi. UNDIP. Semarang.
- [6] Rangkuti, F. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.
- [7] Suharto, E. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Cetakan Keempat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [8] Syafri, W dan I. Setyoko. 2008. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta.
- [9] Winarno, B, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Pressindo. ISBN -979-222-207-3.